

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

2014

PERBUP MALUKU TENGAH NO. 02, BD. 2014/NO.122 : 3 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

- ABSTRAK :**
- Dengan perkembangan perekonomian, tarif retribusi penggantian Biaya Cetak Peta, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 29 Tahun 2012 dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No 6 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 38 Tahun 2007; Perda No. 45 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2009; Perda No. 16 Tahun 2009; Perbup No 07 Tahun 2009; Perbup No. 08 Tahun 2011; Perbup No.09 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta disesuaikan sehingga menjadi sebagai berikut: a. Rp.100,00 (Seratus rupiah) per cm² untuk peta berbahan kertas folio; b. Rp.200,00 (Duaratur rupiah) per cm² untuk peta berbahan kertas foto.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Februari 2014.

PEMBENTUKAN ULP

2014

PERBUP MALUKU TENGAH NO. 04, BD. 2014/NO.124 : 16 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi dan keterpaduan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dibidang Pengadaan barang/Jasa di lingkungan Pemerintah kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukna Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958 jo. PP No. 13 Tahun 1979; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008 ; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 39 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No * Tahun 2006; Perpres No 106 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda No. 45 Tahun 2008; Perda No 16 Tahun 2009; Perda No 1 Tahun 2012; Perda No 22 Tahun 2013; Perka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 5 tahun 2012; Perbup No 7 Tahun 2009; Perbup No.8 Tahun 2011; Perbup No 9. Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, dan ruang lingkup, tugas dan kewenangan ULP.

- CATATAN :**
- Dengan berlakunya Perbup ini, maka Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 050-361.a Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014 dan/atau ketentuan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Februari 2014.

PERUBAHAN, PENYESUAIAN DAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

2014

PERBUP MALUKU TENGAH NO. 07, BD. 2014 : 5 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PERUBAHAN, PENYESUAIAN DAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK :**
- Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan sebagaimana surat usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang perubahan, penyesuaian dan pergeseran Anggaran Belanja antar rekening belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) maka terhadap permasalahan dimaksud perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958 jo. PP No. 13 Tahun 1979; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 83 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Permendagri No. 37 Tahun 2012; Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 27 Tahun 2013; Perda No. 31 Tahun 2007; Perda No. 45 Tahun 2008; Perda No. 16 Tahun 2009; Perda No. 01 Tahun 2012; Perda No. 22 Tahun

2013; Perbup No. 22 Tahun 2013; Perbup No. 26 Tahun 2013;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan, Penyesuaian dan Pergeseran Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014.

CATATAN : - .Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Mei 2014.

PEMANFAATAN PENERIMAAN PELAYANAN JKN – RSUD MASOHI

2014

PERBUP MALUKU TENGAH NO. 09, BD. 2014/no.129 : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI

ABSTRAK :

- Jaminan kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dasar kesehatan dan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Berdasarkan perimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Masohi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958 jo. ; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. No 58 Tahun 2009; PP No 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; PP No. 101 Tahun 2009; Perpres No 12 Tahun 2013; Permenkes No 71 Tahun 2013; Perda No 21 Tahun 2008; Perda No. 40 Tahun 2008; Perda No 45 tahun 2008; Perbup No. 07 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pemanfaatan JKN di RSUD Masohi dengan menetapkan batasah istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif pelayanan kesehatan JKN di klaim oleh RSUD Masohi sesuai dengan pola pembayaran INA CBG's yang ditetapkan Menteri Kesehatan. 44% dari total claim dimanfaatkan sebagai jasa Pelayanan Medis RSUD masohi. 56% dari total claim dimanfaatkan untuk kebutuhan: Bahan Medis Habis Pakai, Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan, Biaya Obat, Biaya Darah, dan Biaya Administrasi.

CATATAN :

- .Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Mei 2014.

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN - BADAN USAHA MILIK NEGERI

2014

PERBUP MALUKU TENGAH NO. 09a, BD. 2014 : 16 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGERI (BUMNeg)

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintahan Negeri, serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik Negeri dan masyarakat sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang ada pada negeri, maka Pemerintah Negeri dapat mendirikan Badan usaha Milik Negeri (BUMNeg). Sesuai Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka diperlukan adanya pedoman bagi Pemerintah Negeri dalam melaksanakan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg).
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958 jo. ; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No. 6 Tahun 1998; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri 39 Tahun 2010; Perda No 01 tahun 2006; Perda No. 03 Tahun 2006; Perda No. 36 Tahun 2008; Perda No. 45 Tahun 2008; Perda No. 26 Tahun 2013; Perbup No. 07 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Modal BUMNegeri berasal dari Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, Pinjaman dan/atau Kerja sama usaha dengan pihak lain.
- CATATAN :**
- .Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 09 Mei 2014.

PEMANFAATAN ALOKASI DANA KAPITASI JKN – FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

2014

PERBUP MALUKU TENGAH NO. 11, BD. 2014/no.131 : 8 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEMANFAATAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah perlu diatur Pemanfaatan Aloasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehtan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2014.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958 jo. ; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. No 58 Tahun 2009; PP No 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; PP No. 101 Tahun 2009; Perpres No.12 Tahun 2013; Perpres No.32 Tahun 2014; Permenkes No.1141/Menkes/PER/VII/2010; Permenkes No.HK.02.02/Menkes/148/I/2010; Permenkes No.1464/Menkes/Per/X/2010; Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011; Permenkes No. 59 Tahun 2013; Permenkes No 71 Tahun 2013; Permenkes No. 19 Tahun 2014; Perda No 5 Tahun 2008; Perda No. 16 Tahun 2009; Kepmenkes No. 128/Menkes/SK/II/2004; Perbup No. 9 Tahun 2011
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur: Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehtan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2014 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dana Non Kapitasi diterima FKTP dari BPJS dibayarkan melalui rekening dinas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati dan diakui sebagai pendapatan daerah.

- CATATAN :**
- Pada saat berlakunya Perbup ini, Maka Perbup No. 12 Tahun 2013 yang mengatur rentang pemanfaatan pendapatan FKTP dari dana bantuan sosial program Jamkesmas dan Jampersal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Juni 2014.

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN – FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

2014

PERBUP MALUKU TENGAH NO. 10, BD. 2014/no.150 : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana non kapitasi oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958 jo. ; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. No 58 Tahun 2009; PP No 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; PP No. 101 Tahun 2009; Perpres No 12 Tahun 2013; Permenkes No 71 Tahun 2013; Perda No 21 Tahun 2008; Perda No. 40 Tahun 2008; Perda No 45 tahun 2008; Perbup No. 07 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar Dwimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Besaran pembayaran dana kapitasi dibayarkan per-bulan, Dwimuka

kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta JKN yang terdaftar secara resmi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku tengah tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana Kapitasi yang diterima FTKP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar minimal 60% dari penerimaan dari penerimaan Dana Kapitasi dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dengan alokasi sebesar 40%.

CATATAN : – .Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Juni 2014.

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2014

2014

PERBUP MALUKU TENGAH NO. 28, BD. 2014/NO.148 : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK :**
- Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014 sebagai Landasan Operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958 jo. PP No. 13 Tahun 1979; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 83 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Permendagri No. 37 Tahun 2012; Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 27 Tahun 2013; Perda No. 31 Tahun 2007; Perda No. 45 Tahun 2008; Perda No. 16 Tahun 2009; Perda No. 01 Tahun 2012; Perda No. 22 Tahun 2013; Perda No. 26 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 September 2014.

PEMANFAATAN PENERIMAAN PELAYANAN JKN – RSUD SAPARUA

2014

PERBUP MALUKU TENGAH NO. 29, BD. 2014/no.149 : 7 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPARUA

ABSTRAK :

- Jaminan kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dasar kesehatan dan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Berdasarkan perimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah Saparua.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958 jo. ; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. No 58 Tahun 2009; PP No 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; PP No. 101 Tahun 2009; Perpres No 12 Tahun 2013; Permenkes No 71 Tahun 2013; Perda No 21 Tahun 2008; Perda No. 40 Tahun 2008; Perda No 45 tahun 2008; Perbup No. 07 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pemanfaatan JKN di RSUD Saparua dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif pelayanan kesehatan JKN di klaim oleh RSUD Saparua sesuai dengan pola pembayaran INA CBG's yang ditetapkan Menteri Kesehatan. 44% dari total claim dimanfaatkan sebagai jasa Pelayanan Medis RSUD Saparua. 56% dari total claim dimanfaatkan untuk kebutuhan: Bahan Medis Habis Pakai, Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan, Biaya Obat, Biaya Darah, dan Biaya Administrasi.

CATATAN : – .Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 September 2014.

PENGELOLAAN DEPOSITO

2014

PERBUP MALUKU TENGAH NO. 41, BD. 2014/NO. 161 : 5 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO KABUPATEN MALUKU TENGAH

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 328 telah menjelaskan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik, maka perlu mengatur mekanisme Pengelolaan Deposito. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kabupaten Maluku Tengah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006. Uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. Bunga Deposito merupakan pendapatan daerah.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Mekanisme Pengelolaan Deposito Kabupaten Maluku Tengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SISTEM PROSEDUR PENGELOLAAN - BMD

2014

PERBUP MALUKU TENGAH NO. 44, BD. 2014/NO.164: 4 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, perlu ada ketentuan teknis yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No 70 Tahun 2012; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2009; Perbup No. 07 Tahun 2009; Perbup No. 22 Tahun 2013;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Petunjuk Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, serta diatur mengenai Pejabat Pengelola BMD, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penerimaan, Penyimpanan, Penyaluran, Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pengendalian dan Pengawasan; Pembiayaan; dan Tuntutan Ganti Rugi.
- CATATAN :**
- Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Desember 2014.